

**PENERAPAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES
PEYELIDIKAN TINDAK PIDANA**
(Studi Kasus Tersangka yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian di Lembaga
Permasyarakatan Kelas II A Sidoarjo)

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



Oleh :
AKHMAD PERMANA
NPM. 0771010162

**YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2011**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

**PENERAPAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES
PEYELIDIKAN TINDAK PIDANA**
(Studi Kasus Tersangka yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian di Lembaga
Permasyarakatan Kelas II A Sidoarjo)

Disusun oleh :

AKHMAD PERMANA
NPM. 0771010162

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

PEMBIMBING UTAMA

PEMBIMBING PENDAMPING

Subani, SH, M.Si.
NIP. 19510504 198303 1 001

Yana Indawati, SH.,M.Kn
NPT. 3 7901 07 0224

**MENGETAHUI
DEKAN**

Hariyo Sulistiyantoro.S.H.,MM.
NIP. 19620625 199103 1 001

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI

**PENERAPAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES
PEYELIDIKAN TINDAK PIDANA**
(Studi Kasus Tersangka yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian di Lembaga
Permasyarakatan Kelas II A Sidoarjo)

Disusun oleh :

AKHMAD PERMANA
NPM. 0771010162

**Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jawa Timur
Pada tanggal : 25 Mei 2011**

Tim Penguji :

Tanda Tangan

1. H. Sutrisno.S.H.,M.Hum. : (.....)
NIP. 19601212 198803 1 001
2. Hariyo Sulistiyantoro.S.H.,MM. : (.....)
NIP. 19620625 199103 1 001
3. Subani SH, MSi. : (.....)
NIP. 19510504 198303 1 001

Mengetahui
DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro.S.H.,MM.
NIP. 19620625 199103 1 001

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-NYA, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi ini. Disini Penulis mengambil judul “PENERAPAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus Tersangka yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Permayarakatan Kelas II A Sidoarjo)”

Penulisan Skripsi ini disusun guna untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi Strata I Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur serta untuk menerapkan dan membandingkan teori yang telah diterima dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Di samping itu juga dapat memberikan bekal tentang hal – hal yang berkaitan dengan disiplin ilmunya dalam menyusun skripsi.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan, bimbingan dan dorongan oleh beberapa pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Hariyo Sulistianoro, S.H., M.M Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Sutrisno, S.H., M.Hum. Selaku WADEK I (Wakil Dekan I) Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak Drs., Ec., Gendut Sukarno, Ms selaku WADEK II Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Subani, S.H., M.Si. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas

Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN”

5. Ibu Yana Indawati., S.H., M.Kn, Selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan membimbing dan memberikan pengarahan kepada penusun dengan meluangkan tenaga dan waktunya.
6. Bapak Ibu dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan bakal ilmu pengetahuan.
7. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional yang telah membantu dalam pelaksanaan dan kelancaran skripsi.
8. Bapak Agus selaku kepala kepegawaian Lembaga Permasyarakatan Sidoarjo yang bersedia mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak Tatok selaku kepala registasi umum Lembaga Permasyarakatan Sidoarjo yang telah membantu memberikan keterangan serta membantu kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Ernesto Seiser,. SH selaku kepala reskrim Polres Sidoarjo
11. Untuk Bapak,Ibu dan Saudaraku tercinta yang telah memberikan dorongan serta perhatian untuk menyelesaikan Skripsi ini.
12. Untuk Desi Ari Fiana yang aku cintai yang telah sabar memberikan semangat dan perhatian penuh untuk terselesainya Skripsi ini.
13. Untuk para tersangka yang telah mewakili dalam wawancara di rumah tahanan Negara dari Polres Sidoarjo yang telah memberikan informasi-informasi yang akurat bekanaan dengan judul skripsi.
14. Seluruh teman-teman mahasiswa angkatan 2007 khususnya Koko, Dani, Lukman, Erik, Ajeng, Yasid, Nanda, Mbak. Ita serta semua teman-teman yang

tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dan memberikan masukan dalam pembuatan Skripsi hingga selesai.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun, Penulis diharapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya, sehingga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Surabaya, April 2011



Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN REVISI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAKSI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Perumusan Masalah.....	5
3. Tujuan Penelitian.....	5
4. Manfaat Penelitian.....	5
5. Kajian Pustaka.....	5
5.1 Tinjauan Umum tentang Penyidik.....	5
5.2 Tugas dan wewenang Kepolisian.....	7
5.3 Pengertian Tersangka dan Hak-hak Tersangka	13
5.3.1 Pengertian tersangka	13
5.3.2 Pengertian hak	13
5.3.3 Hak-hak tersangka dan pengaturan hak-hak tersangka	14

5.4 Pengertian Tindak Pidana, Unsur-unsurnya, dan Bentuk-bentuk Tindak Pidana	19
5.4.1 Pengertian Tindak Pidana	19
5.4.2 Unsur-unsur tindak pidana	21
5.4.3 Bentuk–Bentuk Tindak Pidana	21
5.5 Pengertian Tindak Pidana Pencurian	22
5.6 Dasar Hukum Tentang Tindak Pidana dan Hak-Hak Tersangka	23
5.6.1 Dasar Hukum Tindak Pidana	23
5.7 Pengertian Dampak, Fisik dan Psikologis	25
6. Metode Penelitian	26
a. Pendekatan masalah	26
1) Jenis dan tipe penelitian	26
2) Sumber data	27
b. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	28
c. Metode analisis data	29
7. Pertanggung jawaban Sistematika	29

BAB II FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN HAK-HAK TERSANGKA

DALAM PROSES PENYELIDIKAN SERING DIABAIKAN	31
2.1. Para Tersangka yang haknya diabaikan di Lembaga Perasyarakatan Sidoarjo	31
2.2 Faktor-faktor yang menjadi penyebab terabaikannya hak-hak tersangka dalam proses penyelidikan	36
2.2.1 Faktor internal	37

2.2.2 Faktor Eksternal	40
BAB III DAMPAK YANG TERJADI BAGI TERSANGKA YANG HAK-HAKNYA DIABAIKAN DALAM PROSES PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA .45	
3.1 Ada dua dampak yang ditimbulkan bagi tersangka yang hak-haknya diabaikan	45
3.2 Analisis dampak yang terjadi oleh 5 (lima) orang tersangka di Lembaga Permasyarakatan Sidoarjo	48
BAB IV PENUTUP	51
4.1 KESIMPULAN	51
4.2 SARAN	53
DAFTAR PUSTAKA	55
DAFTAR LAMPIRAN	56

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian Kementrian Hukum dan HAM R.I
2. Surat Pernyataan Wawancara dari Lembaga Permayarakatan Kelas II A
Sidoarjo
3. Wawancara Tersangka
4. B.A.P Tersangka



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : AKHMAD PERMANA
NPM : 0771010162
Tempat Tanggal Lahir : Sidoarjo, 07 Desember 1987
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

**PENERAPAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES
PEYELIDIKAN TINDAK PIDANA
(Studi Kasus Tersangka yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian di Lembaga
Permasyarakatan Kelas II A Sidoarjo)**

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hak-hak tersangka dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh seorang penyidik sebagai aparat penegak hukum dan tersangka sebagai pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian dan untuk mengetahui faktor-faktor serta dampak-dampak yang menyebabkan hak-hak tersangka diabaikan dalam proses penyelidikan tindak pidana.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis empiris yang bersifat deskriptif analisis. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama penelitian ini. Sedangkan data sekunder digunakan sebagai pendukung data primer. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah dengan menggunakan dua jenis metode pengumpulan data, yaitu metode studi kepustakaan dan metode wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan cara metode diskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak tersangka yang diatur dalam KUHAP khususnya Pasal 52 yaitu dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim dan pada Pasal 66 yaitu Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Dalam pelaksanaannya masih ditemui beberapa faktor-faktor yang menyebabkan hak-hak tersangka diabaikan dalam proses penyelidikan tindak pidana. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah untuk memberikan masukan kepada penyidik agar lebih menghargai tersangka dan menerapkan hak-hak yang diberikan kepada undang-undang kepada tersangka.

Kata Kunci : Peyelidikan, Tersangka, Hak-hak tersangka dalam proses penyelidikan.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi yang semakin maju ini, masyarakat dituntut akan kebutuhan yang sangat tinggi karena tanpa adanya pendidikan maupun *skill* yang cukup, orang akan tersingkir dari peradapan yang semakin ketat ini, semua orang ingin menjadi yang terbaik dalam kehidupan maupun pekerjaan. Apabila dikehidupan yang semakin maju ini tanpa dibekali skill maupun pendidikan yang cukup, hal ini akan berakibat buruk bagi kehidupannya dan sekaligus berdampak negatif terhadap lingkungan misalkan seorang pengangguran yang secara otomatis akan melakukan perbuatan-perbuatan kejahatan, contoh pencurian. Kejahatan tersebut merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang. Kondisi pelaku kejahatan sering kali dapat dipengaruhi oleh tingkat perekonomian, pendidikan serta iman yang lemah sehingga dengan mudah melakukan tindak kejahatan. Dalam kenyataan yang ada sekarang ini, para pelaku kejahatan sepertinya semakin merajalela, hal ini dapat dikatakan sebagai apa yang dinamakan labeling approach yaitu gejala kejahatan sebagai akibat dari proses-proses sosial yang terjadi dalam masyarakat, kejahatan merupakan suatu perikelakuan manusia yang diciptakan oleh sebagian warga-warga masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang. Ini berarti bahwa kejahatan merupakan suatu cap yang diberikan terhadap perikelakuan-perikelakuan tertentu dari manusia. Tindak kejahatan tersebut tidak akan biasa hilang atau dimusnahkan akan tetapi dapat dicegah. Dalam hal ini yang sangat berperan penting dalam penegakan hukum di Indonesia berdasarkan tugas dan wewenangnya

menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU Kepolisian RI) adalah Polisi atau penyidik.

Peran Polisi saat ini adalah sebagai pemelihara Kamtibmas juga sebagai aparat penegak hukum dalam proses pidana. Polisi adalah aparat penegak hukum jalanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan penjahat. Dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, Dalam Pasal 4 UU No.2 Tahun 2002 juga menegaskan Kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam menjalankan tugas sebagai hamba hukum polisi senantiasa menghormati hukum dan hak asasi manusia. Penyelenggaraan fungsi kepolisian merupakan pelaksanaan profesi artinya dalam menjalankan tugas seorang anggota Polri menggunakan kemampuan profesinya terutama keahlian di bidang teknis kepolisian. Oleh karena itu dalam menjalankan profesinya setiap insan kepolisian tunduk pada kode etik profesi sebagai landasan moral.

Sistem beracara pidana yang diatur didalam KUHAP, telah banyak dijelaskan bahwa untuk penyelidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik polri harus diawali dari suatu laporan dan atau aduan dari pihak yang merasa dirugikan kemudian

penyidik Polri mengeluarkan surat pengeledahan, apabila dalam pengeledahan tersebut ditemukan suatu bukti, penyidik langsung membuat surat penahanan. Pada saat penyidik melakukan suatu penyelidikan terhadap seorang tersangka yang diduga melakukan perbuatan tindak pidana hal ini sering sekali terjadi suatu keganjalan. Dalam realita pelaksanaan penegakan hukum, penyidik Polri masih kerap terfokus pada pengakuan seorang tersangka dalam menemukan titik terang suatu tindak kejahatan, pengakuan seorang tersangka kerap kali menjadi langkah awal bagi penyidik Polri dalam mengumpulkan alat bukti kejahatan. Dengan cara ini, tentunya suatu tindakan yang keras menjadi suatu hal yang tak terelakkan, ada beberapa perilaku menyimpang yang dilakukan oleh penyidik, kadang penyidik melakukan suatu tindakan kekerasan terhadap tersangka pada saat pemeriksaan dan penyidik mengeluarkan surat perintah penghentian penyidik (selanjutnya disingkat dengan SP3) tanpa alasan yang jelas.¹

Ada dua sistem pemeriksaan dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disingkat KUHAP) yang dilakukan terhadap tersangka/ terdakwa yaitu pemeriksaan permulaan (pendahuluan) yang dilakukan oleh kepolisian/ penyidik dan pemeriksaan persidangan yang dilakukan oleh hakim. Dalam sistem pemeriksaan permulaan, ketentuan KUHAP menganut azas pemeriksaan Akuisitor (*Accusatoir*), tersangka dalam proses pemeriksaan pendahuluan diatur dalam ketentuan Pasal 52 dan 184 ayat (1) KUHAP, tidak boleh diperlakukan sebagai terdakwa (obyek) yang harus diperiksa, melainkan tersangka dilakukan sebagai subyek, yang artinya tersangka

¹ Hj. Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, P.T. Alumni, Bandung, 2006, h. 42

tidak dapat dipaksa untuk mengaku bersalah dengan cara paksaan, tekanan ataupun ancaman-ancaman. Ketentuan ini intinya menyatakan bahwa tujuan pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik tidak untuk mendapatkan pengakuan tersangka tetapi untuk mendapatkan keterangan tersangka mengenai peristiwa pidana yang dipersangkakan kepadanya.²

Dalam wawancara langsung terhadap beberapa tersangka yang berada dalam rumah tahanan Negara/ Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sidoarjo bahwa sebagian besar memang hak-hak tersangka kerap kali diabaikan. Menurut keterangan tersangka pada proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik, tersangka diperlakukan kasar dan dipaksa untuk memberikan keterangan yang sebenarnya/ dipaksa mengaku terhadap tindak kejahatan yang dilakukan. Perbuatan Penyidik tersebut membuat tersangka terpaksa mengaku agar tidak lagi diperlakukan kasar.

Banyak yang mungkin tidak tahu akan hak tersangka yang terbilang “istimewa”. Bukan masyarakat yang masih awam dengan persoalan hukum saja. Bahkan tak sedikit penyidik Polri yang lupa atau mungkin kurang paham akan hak-hak tersangka.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik mengangkat permasalahan yaitu :

²Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2001. h.21

- 1) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan hak-hak tersangka dalam proses penyelidikan sering diabaikan ?
- 2) Bagaimana dampak yang terjadi bagi tersangka yang hak-haknya tidak diperdulikan dalam proses penyelidikan ?

3. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui faktor apa saja yang membuat penyidik polri kerap kali mengabaikan hak-hak tersangka dalam proses penyelidikan ?
- 2) Untuk dapat mengetahui bagaimana dampak yang terjadi bagi tersangka yang diabaikan hak-haknya dalam proses penyelidikan ?

4. Manfaat Penelitian

- 1) Secara Teoritis, hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu hukum di Bidang Pidana, khususnya mengenai hak-hak tersangka dalam proses penyelidikan.
- 2) Secara Praktis, hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi masyarakat dan instansi yang terkait dalam memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka dalam proses penyelidikan.

5. Kajian Pustaka

5.1 Tinjauan Umum tentang Penyidik

Pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Selanjutnya disingkat dengan UU Kepolisian RI), bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraan

fungsi kepolisian tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) UU Kepolisian RI. Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Penyelidikan dan penyidikan dalam KUHAP diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 11.

Pada Bab I Ketentuan Umum KUHAP, Pasal 1 butir 1 dan 2 merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan bahwa, penyidik adalah Pejabat Polri atau Pejabat Pegawai Negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Kemudian yang dimaksud dengan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Jika diperhatikan secara seksama, dan melihat ketentuan KUHAP yang mengatur tentang Penyelidikan, bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dari pengertian penyelidikan menurut undang-undang, dapat dengan jelas mengerti bahwa sebenarnya penyelidikan itu adalah penentuan suatu perbuatan dapat dikatakan

suatu tindak pidana atau tidak. Ketika suatu perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu tindak pidana, baru dapat dilakukan proses penyidikan. Dalam proses penyelidikan ini biasanya dilakukan oleh POLRI dan untuk kasus-kasus tertentu dapat dilakukan oleh Jaksa. Di saat inilah dimana seseorang disebut sebagai tersangka.

5.2 Tugas dan Wewenang Kepolisian

Pasal 13 dijelaskan bahwasannya dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas: Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya dan dalam rangka melaksanakan fungsi penyelidikan dan penyidikan, undang-undang telah memberikan hak istimewa atau *hak privilese* kepada Polri untuk melakukan memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menggeledah, menyita terhadap tersangka dan barang yang dianggap berkaitan dengan tindak pidana. Mengenai ketentuan-ketentuan penyelidikan dan penyidikan ini lebih jelasnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diantaranya menguraikan pengertian penyidikan, penyelidikan, penyidik dan penyelidik serta tugas dan wewenangnya.

Wewenang Kepolisian Pasal 15 UU Kepolisian Republik Indonesia menyatakan bahwasannya dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a) menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b) membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d) mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f) melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h) mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang, mencari keterangan dan barang bukti;
- i) menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- j) mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- k) memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- l) menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- m) menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan

e. menghormati hak asasi manusia.

Penyidik dalam memerankan fungsinya sebagai penegak hukum dan keadilan, adakalanya penyidik harus menggunakan pemaksaan dan tindakan kekerasan. Demikian juga penegak hukum lainnya diberikan berbagai kekuasaan yang dapat digunakan guna tercapainya penegakan hukum yang sah. Diantara kekuasaan dan wewenang yang seringkali digunakan secara umum adalah kekuasaan penangkapan dan penahanan dan wewenang menggunakan kekerasan jika memang sangat diperlukan untuk pencapaian tujuan penegakan hukum, kewenangan/kekuasaan profesi ini sering disebut dengan diskresi (*discretion*), namun pada pelaksanaannya sangat jauh dari kenyataannya.

Pasal 18 ayat (1) undang-undang kepolisian untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Ayat (2) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini bertindak dengan penilaian sendiri dapat disebut sebagai diskresi. Istilah diskresi dikenal dalam lingkungan pejabat publik yang berasal dari bahasa Inggris *discretion* atau *discrecionalary power*, dan dalam lingkungan hukum administrasi dikenal *fries ermersen* asal kata dari Jerman, yang berarti kebebasan bertindak atau mengambil keputusan menurut pendapat sendiri. *Discretion* dalam *Black Law Dictionary* mengandung arti *A public official's power or right to act in certain circumstances according to personal*

judgement and conscience. Penekanan tersebut pada kekuasaan pejabat publik untuk bertindak menurut keputusan dan hati nurani sendiri. Tindakan tersebut dilakukan atas dasar kekuasaan atau wewenang yang melekat.³

Menurut Thomas J. Aaron dalam bukunya *The Control of Police* sebagaimana dikutip oleh M. Faal, *discretion* diartikan, *iscretion is power authority conferred by law to action on the basic of judgment or conscience, and its use is more on idea of morals then law*, artinya suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atau pertimbangan dan keyakinannya dan lebih menekankan pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum. Dilihat dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan secara khusus, bahwa diskresi adalah suatu wewenang untuk bertindak atau tidak bertindak atas dasar penilaiannya sendiri dalam menjalankan kewajiban hukum. Oleh karena tindakan yang dilakukan atas dasar penilaian dan pertimbangan sendiri, maka tepatnya dan tidaknya penilaian sangat dipengaruhi oleh moralitas pengambilan tindakan.⁴

Timbulnya penilaian yang diyakini untuk bertindak bagi setiap anggota kepolisian sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang konkrit yang mengharuskan untuk bertindak, namun demikian penilaian yang diyakini setiap individu anggota kepolisian sangatlah berbeda-beda tergantung dari pengalaman, pengetahuan, kecerdasan dan moralitas masing-masing. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Hadisapoetro, bahwa diskresi kepolisian yang dilakukan oleh seseorang terhadap masalah yang dihadapi

³ Sadjijono, *Mengenai Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hukumnya dalam Hukum Administrasi*, LaksBang MEDIATAMA, Surabaya, 2006. Hal. 152.

⁴ Ibid. h. 153

secara nyata, berdasar atas keyakinan, kebenaran dan pertimbangan-pertimbangan pribadinya yang terbaik pada saat itu. Berkaitan dengan hal tersebut setiap anggota kepolisian dalam menggunakan wewenang diskresi tidak boleh digunakan secara sembarangan tanpa alasan yang rasional dan logis, akan tetapi selektif dan proposional dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

5

Oleh karena wewenang untuk bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri tersebut dalam rangka menjalankan kewajiban hukum dan kewajiban tugas, maka di dalam melakukan tindakan hukum wajib berpegang pada norma hukum maupun moral. Norma moral berkaitan dengan tindakan tersebut berdasarkan nurani dan norma hukum karena wewenang dijalankan atas dasar undang-undang sehingga dalam menilai suatu situasi konkrit diperlukan persyaratan-persyaratan bagi setiap anggota kepolisian. Diskresi kepolisian tidak dirumuskan batas-batasnya, unsur dan kreterianya, maka penggunaan diskresi kepolisian ini rentan adanya tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang. Oleh karena diskresi kepolisian digunakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan dan sangat ditentukan oleh perilaku setiap anggota kepolisian selaku aparatur pemerintahan, maka di dalam mengambil tindakan dan penilaian harus tetap berdasar pada undang-undang dan hak asasi manusia. Di dalam Pasal 16 ayat 1 UU Kepolisian RI menyebutkan bahwa wewenang kepolisian untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Substansi Pasal dimaksud dapat

5

Ibid. hal. 155-156

ditafsirkan bahwa diskresi kepolisian masuk pada lingkup tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, karena tindakan diskresi tidak ada rumusan yang jelas dan tegas namun dijalankan atas dasar wewenang yang diberikan undang-undang dan tindakan tersebut harus dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam penggunaan diskresi kepolisian dapat dikontrol melalui syarat yang dirumuskan dalam Pasal 16 ayat (2) UU Kepolisian RI.⁶

5.3 Pengertian Tersangka dan Hak-hak Tersangka

5.3.1 Pengertian tersangka

Pasal 1 butir 14 KUHAP Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana⁷.

5.3.2 Pengertian hak

Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum yang memberikan keleluasaan kepada seseorang untuk melaksanakannya. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).

⁶ Ibid. hal. 158

⁷Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan) bagian pertama edisi kedua*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008. h.42

Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM).

5.3.3 Hak-hak tersangka dan pengaturan hak-hak tersangka

Hak-hak tersangka adalah hak konstitusional seorang baik yang didapat sejak mereka lahir (HAM) maupun hak-hak yang diberikan undang-undang. Hak-hak yang diberikan undang-undang ini terkait dengan statusnya sebagai tersangka. Hak-hak itu diatur dalam KUHAP baik secara eksplisit maupun implisit dalam rumusan pasal-pasal yang antara lain;

- a. Hak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik, diajukan ke penuntut umum, segera dimajukan ke pengadilan dan segera diadili oleh pengadilan;
- b. Hak untuk diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang dipersangkakan serta didakwakan kepadanya;
- c. Hak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan;

- d. Hak untuk mendapat bantuan juru bahasa atau penerjemah bagi terdakwa atau saksi yang bisu atau tuli;
- e. Hak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan;
- f. Hak memilih sendiri penasehat hukumnya;
- g. Hak mendapat bantuan hukum cuma-cuma bagi yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih;
- h. Hak menghubungi penasehat hukumnya dan bagi yang berkebangsaan asing berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya;
- i. Hak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatannya;
- j. Hak diberitahukan tentang penahanannya kepada keluarga atau orang lain yang serumah atau orang lain yang bantuannya dibutuhkan;
- k. Hak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya;
- l. Hak menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan;
- m. Hak mengirim surat atau menerima surat dari/ ke penasehat hukumnya atau keluarganya dengan tidak diperiksa kecuali terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat tersebut disalahgunakan;
- n. Hak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan;
- o. Hak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum;
- p. Hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- q. Hak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya.

- r. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.
- s. Hak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama.
- t. Hak tersangka wajib diberitahukan hakim ketua, segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan.⁸

Hak-hak Tersangka Berdasarkan KUHAP

Pasal 50

- 1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
- 2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
- 3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Pasal 51

Untuk mempersiapkan pembelaan :

- a) tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
- b) terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

Pasal 52

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.

Pasal 53

- 1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
- 2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.

Pasal 54

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 55

⁸Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000. h. 38-39

Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.

Pasal 56

- 1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
- 2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Pasal 57

- 1) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
- 2) Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.

Pasal 58

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.

Pasal 59

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.

Pasal 60

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.

Pasal 61

Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara

tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.

Pasal 62

- 1) Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis.
- 2) Surat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan.
- 3) Dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah ditilik".

Pasal 63

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan.

Pasal 64

Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

Pasal 65

Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

Pasal 66

Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Pasal 67

Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

Pasal 68

Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan selanjutnya.

5.4 Pengertian Tindak Pidana, Unsur-unsurnya, dan Bentuk-bentuk Tindak Pidana

5.4.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam ilmu pengetahuan hukum pidana yang ditelaah secara yuridis, berbeda dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan yang bisa diartikan secara yuridis maupun kriminologis. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, pandangan mengenai pengertian tindak pidana telah mengarah kepada dua golongan yang berbeda, yaitu aliran monistis yang tidak menjelaskan pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility* dan aliran dualistis yang menjelaskan tentang pemisahan kedua hal di atas, yaitu :

a) Pandangan Monistis:

- (1) Simons: *Strafbaar Feit* adalah “*een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*”. Unsurnya adalah perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan oleh orang yang mampu bertanggung jawab;
- (2) Van Hamel: *Strafbaar Feit* adalah “*een wettelijk omschreven menschelijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan hschuld te witjen*”. Unsurnya adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan patut dipidana;
- (3) J. Baumann: *Strafbaar Feit* adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan;
- (4) Wirjono Prodjodikoro: Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana;

- (5) Karni: Delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak, yang dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan itu dapat dipertanggungkan.⁹

b) Pandangan Dualistis:

- (1) H.B. Vos: *Een strafbaar feit is een menselijke gegrading waarop door de wet (genomen in de ruime zin van "wettelijke bepaling") straf is gesteld, een gegrading dus, die in het algemeen (tenzij er een uitsluitingsgrond bestaat) op straffe verboden is.* Unsur dari tindak pidana itu hanya kelakuan manusia dan diancam pidana dalam undang-undang.
- (2) W.P.J. Pompe: *Strafbaar Feit* adalah tidak lain dari *feit* yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang. Sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah sifat mutlak untuk adanya tindak pidana. Untuk penjatuhan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi disamping itu harus ada orang yang dapat dipidana. Orang ini tidak ada, jika tidak ada sifat melawan hukum atau kesalahan.
- (3) Moeljatno: Perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Unsur dari perbuatan pidana itu adalah perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil), dan bersifat melawan hukum (syarat materiil).¹⁰

Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penggunaan istilah tindak pidana dan memaknai tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

5.4.2 Unsur-unsur tindak pidana

Menurut Moeljatno merumuskan unsur tindak pidana dibagi menjadi 3 yaitu :

- a. Perbuatan (melakukan suatu tindakan kejahatan)
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

⁹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam hukum pidana*, Pidato Dies Natalis Universitas Gadjah Mada, 1955. h. 11

¹⁰ Ibid. h. 42-43

Menurut Tresna merumuskan tindak pidana terdiri dari unsur-unsur perbuatan :

- b. Rangkaian perbuatan
- c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- d. Diadakan tindakan hukum

Menurut Vos merumuskan unsur-unsur tindak pidana :

- a. kelakuan
- b. diancam pidana
- c. dilakukan dengan perundang-undangan

Unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP :

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana
- i. Unsur obyek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subyek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana¹¹

5.4.3 Bentuk–Bentuk Tindak Pidana

Tindak pidana menurut KUHP kita dibagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan masuk ke

dalam Buku II KUHP, sedangkan pelanggaran masuk ke dalam Buku III KUHP. Perbedaan kejahatan dengan pelanggaran dapat dilihat dari segi kualitatif dan kuantitatif. Perbedaan yang bersifat kuantitatif yaitu:

- a) Kejahatan atau *Rechts delict* adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu

¹¹ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. h. 79

diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasa oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.¹²

b) Pelanggaran atau *Wet delict* adalah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang menyebutnya sebagai suatu delik, jadi karena ada undang-undang mengancam dengan pidana.¹³

Pembedaan yang bersifat kuantitatif, pembedaan ini dilihat dari segi kriminologi (penulis: kriminologis), yaitu kalau pelanggaran ancaman pidananya lebih ringan dibandingkan kejahatan¹⁴. Jadi, dalam pembedaan kuantitatif dilihat dari sudut berat ringannya hukuman atau sanksi yang dijatuhkan.

5.5 Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Yang dimaksud dengan pencurian menurut Pasal 362 Undang-undang No. 27 tahun 1999 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Selanjutnya disingkat KUHP) adalah Barang siapa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, dihukum karena melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah.

5.6 Dasar Hukum Tentang Tindak Pidana dan Hak-Hak Tersangka

¹² A. Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hal. 65.

¹³ Ibid. h. 66

¹⁴ Ibid. h. 67.

5.6.1 Dasar Hukum Tindak Pidana

Buku II dan buku III KUHP berisi tentang rumusan tindak pidana- tindak pidana tertentu. Tentang bagaimana cara pembentukan undang-undang dalam merumuskan tindak pidana itu pada kenyataanya memang tidak seragam.

Dalam hal ini akan dilihat tiga dasar perbedaan cara dalam merumuskan tindak pidana dalam KUHP :

1. Cara pencantuman unsur-unsur dan kualifikasi tindak pidana

a. Mencantumkan unsur pokok, kualifikasi dan ancaman pidana, cara yang pertama ini merupakan cara yang paling sempurna dalam hal ini merumuskan tindak pidana dalam bentuk pokok/ standar dengan mencantumkan unsur subyektif maupun obyektif contoh Pasal 338 (pembunuhan), 362 (pencurian), 368 (pengancaman), 369 (pemerasan), 372 (penggelapan), 378 (penipuan), 406 (perusakan), 108 (pemberontakan). Dalam unsur pokok tindak pidana tersebut di atas terdapat unsur obyektif maupun subyektif secara lengkap, contohnya 368 yang diberi kualifikasi pemerasan, terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) unsur obyektif :
 - a) memaksa (tingkah laku)
 - b) seseorang (yang dipaksa)
 - c) dengan kekerasan dan dengan ancaman kekerasan

d) agar orang menyerahkan benda, memberi utang, menghapus piutang

2) unsur subyektif

a) dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

b) dengan melawan hukum

b. mencantumkan semua unsur pokok tanpa kualifikasi dan mencantumkan ancaman pidana, tindak pidana yang menyebutkan unsur-unsur pokok tanpa menyebut kualifikasi contoh tindak pidana Pasal 242 kualifikasi sumpah palsu, penghasutan (160), laporan palsu (220), membuang anak (305), pembunuhan anak (341), penggelapan oleh pegawai negeri sipil (415).

c. mencantumkan kualifikasi dan ancaman pidana tindak pidana yang dirumuskan dengan cara ini merupakan yang paling sedikit hanya dijumpai pasal tertentu saja contoh penganiayaan (351)

2. Dari sudut titik beratnya larangan

a. Cara formil dalam merumuskan dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu, contoh Pasal 362, jika perbuatan mengambil selesai, maka pencurian

selesai, atau perbuatan membuat palsu (surat), dan memalsu (surat) selesai dilakukan, kejahatan itu selesai (263).

b. Tindakan pidana yang dirumuskan itu adalah pada menimbulkan akibat tertentu, disebut dengan akibat yang dilarang atau akibat konstitutif. Contoh pasal 338 (pembunuhan).

3. Dari sudut pembedaan tindak pidana antara bentuk pokok, bentuk yang lebih berat dan yang lebih ringan

a. Perumusan bentuk pokok merupakan pengertian yuridis dari tindak pidana contoh 338, 362, 372, 378, 369, 406.

b. Perumusan dalam bentuk yang diperingan dan yang diperberat unsur-unsur bentuk pokoknya tidak diulang kembali atau dirumuskan kembali, melainkan menyebutkan saja pasal bentuk pokok contoh Pasal 364, 373, 379 atau kualifikasi bentuk pokok contoh 339, 363, 365.¹⁵

5.7 Pengertian Dampak, Fisik dan Psikologis

Secara umum pengertian dampak adalah segala sesuatu yang ditimbulkan akibat adanya sesuatu. Dampak itu sendiri juga bisa berarti, konsekwensi sebelum dan sesudah adanya sesuatu. Psikologis adalah sesuatu yang berhubungan langsung dengan kejiwaan dan Fisik adalah sesuatu yang menimbulkan luka apabila terkena pukulan. Psikologis secara

¹⁵Ibid. h.115

bersamaan, dapat difahami bahwa perlakuan fisik berakibat traumatis psikologis dan proses kesembuhan itu berbanding terbalik, tidak seiring sejalan antar keduanya. Boleh jadi luka psikologis atau trauma itu terbawa terus selama hidupnya. Hampir dapat dipastikan bahwa setiap perlakuan kasar secara fisik sedikit banyak pasti disertai dengan rasa trauma yang gejalanya tidak selalu seketika terlihat, tetapi di kelak kemudian hari atau setiap kali melihat kejadian yang serupa.

6. Metode Penelitian

a. Pendekatan masalah

1) Jenis dan tipe penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai perilaku- perilaku (atau aksi-aksi dan interaksi) manusia secara actual telah dan/ atau yang secara potensial akan terpola. Karena setiap perilaku atau aksi itu merupakan suatu realita sosial yang tersimak dalam pengalaman indrawi yang empiris, setiap penelitian yang mengonsepsikan hukum sebagai perilaku dan aksi yang dapat disebut dengan penelitian sosial.¹⁶

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif analisis. Dalam artian penelitian ini diharapkan mampu melukiskan gambaran secara sistematis, terperinci dan menyeluruh. Jadi dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan tipe penelitian menggunakan penelitian hukum deskriptif analisis.¹⁷

2) Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan

¹⁶ M. Syamsudin, *Operasinalisasi Penelitian Hukum*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 30

¹⁷ Ibid. h. 127

kepastakaan dengan cara menelusuri literatur yang berhubungan dengan penelitian.¹⁸

Data sekunder terbagi lagi menjadi :

a). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang dimaksud adalah Peraturan perundang-undangan RI.

b). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Bahan-bahan sekunder yang dipergunakan didalam penulisan skripsi ini.¹⁹

Data Primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung objeknya misalnya dengan cara wawancara, observasi, pengamatan dan angket.²⁰

Data yang diperoleh penulis dalam hal ini menggunakan wawancara, wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan, teknik wawancara ini banyak dilakukan di Indonesia sebab merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam setiap survai. Tanpa wawancara penelitian akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan bertanya langsung kepada responden. Seperti kita lihat atau dengan lewat teknik wawancara, televise atau radio, merupakan teknik yang baik untuk menggali informasi di samping sekaligus berfungsi member penerangan kepada masyarakat.²¹

¹⁸ Ibid. h. 98

¹⁹ Ibid. h. 96

²⁰ Ibid. h. 99

²¹ Cholid Narbuko, H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : P.T. Bumi Aksara, 2003. h.

Dan penulis juga menggunakan data angket yang berupa pertanyaan-pertanyaan berhubungan dengan judul proposal skripsi.

b. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan, perolehan bahan hukum melalui penelitian kepustakaan dikumpulkan dengan cara mencari dan mempelajari serta memahami buku-buku ilmiah yang memuat pendapat beberapa sarjana. Selain itu peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan pembahasan skripsi ini juga dikumpulkan, bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan tersebut selanjutnya akan dilakukan penyuntingan bahan hukum, pengklasifikasian bahan hukum yang relevan dan penguraian secara sistematis.

c. Metode Analisis Data

Data-data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi²²

7. Pertanggung jawaban Sistematika

Untuk memudahkan pemahaman skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri beberapa sub-sub :

Bab I Pendahuluan. Didalamnya menguraikan tentang latar belakang masalah, yang kemudian berdasarkan masalah tersebut maka dirumuskan

²²Ibid. h. 44

permasalahan dan alasan pemilihan judul. Selanjutnya tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka yang merupakan landasan dari penulisan skripsi yang diuraikan beberapa konsep definisi berkaitan dengan judul penelitian. Selanjutnya metode penelitian yang mengemukakan tentang tipe penelitian dan pendekatan masalah, sumber bahan hukum, langkah penelitian, dan yang terakhir pertanggung jawaban sistematika.

Bab II, menguraikan tentang Faktor-faktor yang menyebabkan terabainya hak-hak tersangka dalam proses penyelidikan. dalam bab II ini terdiri dari dua sub bab yaitu : sub bab pertama tentang Para Tersangka yang haknya diabaikan di Lembaga Permasyaraktan Sidoarjo. Untuk sub bab kedua tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab terabaikannya hak-hak tersangka dalam proses penyelidikan, sub bab yang ke dua ini terbagi menjadi dua sub-sub bab yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Bab III, menguraikan tentang bagaimana dampak yang terjadi bagi tersangka yang hak-haknya tidak diperdulikan dalam proses penyelidikan. Dalam bab tiga ini terbagi menjadi dua sub bab yaitu : sub bab pertama adalah dua dampak yang ditimbulkan bagi tersangka yang hak-haknya diabaikan, dampak tersebut terbagi menjadi dua, berupa dampak terhadap psikologis dan dampak terhadap fisik, dan sub bab yang ke dua adalah analisis dampak yang terjadi oleh 5 (lima) orang tersangka di Lembaga Permasyaraktan Sidoarjo.

Bab IV, merupakan Bab Penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan tentang inti dari Bab II dan Bab III.